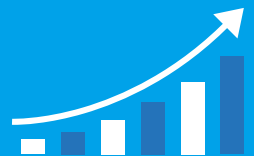


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN

2016 - 2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN

2016 - 2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN 2016- 2020

ISSN : 2774-2393
Nomor Publikasi : 33730.2106
Katalog BPS : 9302020.3373
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : ix + 58 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Gambar Kover:
Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Ilustrasi Kover:
Gerbang Tol Salatiga

Diterbitkan Oleh :
© BPS Kota Salatiga

Dicetak Oleh :
Percetakan Putra Karya, Salatiga

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Pengeluaran 2016-2020 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan setiap tahun. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan Kota Salatiga dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Salatiga, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Salatiga,



Satriono S.Si, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Infografis	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
B. Kegunaan Statistik PDRB.....	4
Infografis	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	8
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	11
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	13
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
E. Perubahan Inventori	20
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	24
Infografis	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SALATIGA 2016-2020	27
A. Tinjauan Agregat PDRB Kota Salatiga menurut Pengeluaran	28
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	38
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
F. Struktur Perubahan Inventori	40
G. Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa	41
Infografis	43
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2020	44
A. PDRB PERKAPITA	45
B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	46

C. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	47
D. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	48
Infografis	49
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN	52
Daftar Pustaka	58

<https://salatigakota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Milyar Rupiah</i>)	29
Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Milyar Rupiah</i>)	29
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Salatiga menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	31
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	33
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	34
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	35
Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2016-2020	37
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2016-2020	38
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2016-2020	40
Tabel 10. Struktur Perubahan Inventori Tahun 2016-2020	41
Tabel 11. Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2016-2020	42
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2016-2020	45
Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016-2020	46
Tabel 14. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2016-2020	47
Tabel 15. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2016-2020	48

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)	30
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Tahun 2020	32

<https://salatigakota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020 (<i>Juta Rupiah</i>)	53
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020 (<i>Juta Rupiah</i>)	54
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020 (<i>Persen</i>)	55
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020 (<i>Persen</i>)	56
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020 (<i>Persen</i>)	57

PENJELASAN TEKNIS

1. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
3. ATAS DASAR HARGA (adh)
4. Pengeluaran konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)
5. *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*
6. *United Nations* (UN)
7. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
8. Badan Pusat Statistik (BPS)
9. Indeks Harga Konsumen (IHK)
10. Lembaga Non Profit (LNP)
11. Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)
12. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT)
13. Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)
14. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD)
17. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
18. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
19. Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia.
20. Indeks Implisit adalah Perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan pada periode tertentu.

PERTUMBUHAN PER KOMPONEN PDRB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2020



Konsumsi
Rumah
Tangga
-1,14%



Konsumsi
Pemerintah
-1,54%

Pertumbuhan
Tahun 2020
-1,68%



Konsumsi
Lembaga Non
Profit -1,99%



PMTB
-6,92%



BAB I

PENDAHULUAN

<https://salatigakota.bps.go.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama setahun, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama setahun.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. JasaKeuangan danAsuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15.

Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, (3) Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, dan (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor).

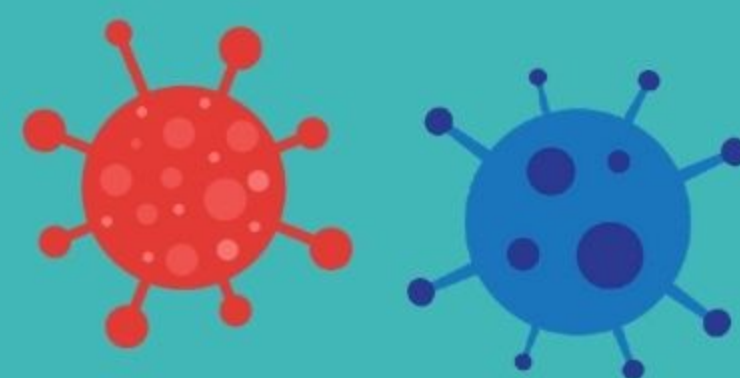
Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/*daerah/region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/*luar wilayah*.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

PDRB ADHB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2020 (MILYAR RUPIAH)



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://salatigakota.bps.go.id>

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNPRT dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan

sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya

diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT adh Berlaku. PKLNPRRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan dibidang fiskal dan moneter. Pemerintah sebagai konsumen akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Pemerintah sebagai produsen akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa/Kelurahan) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kota Salatiga mencakup PK-Pemerintah Kota Salatiga; PK-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana Kota Salatiga berada; dan PK-Pemerintah Kelurahan yang ada di wilayah Kota Salatiga.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kota Salatiga adalah:

- Data realisasi APBN untuk instansi vertikal di Kota Salatiga (KPPN Semarang)
- Data realisasi APBD (BKD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari KPPN Semarang, BKD Kota Salatiga serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan. Untuk level kabupaten/kota, PK-P adh berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi instansi vertikal di kabupaten/kota tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Data Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi

dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi disetiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (*adh*) pembelian, didalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh* berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh* Konstan, maka PMTB *adh* Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh* Berlaku maupun *adh* Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan

mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan

diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam

bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adhBerlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang ditahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi didalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks

harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;

- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

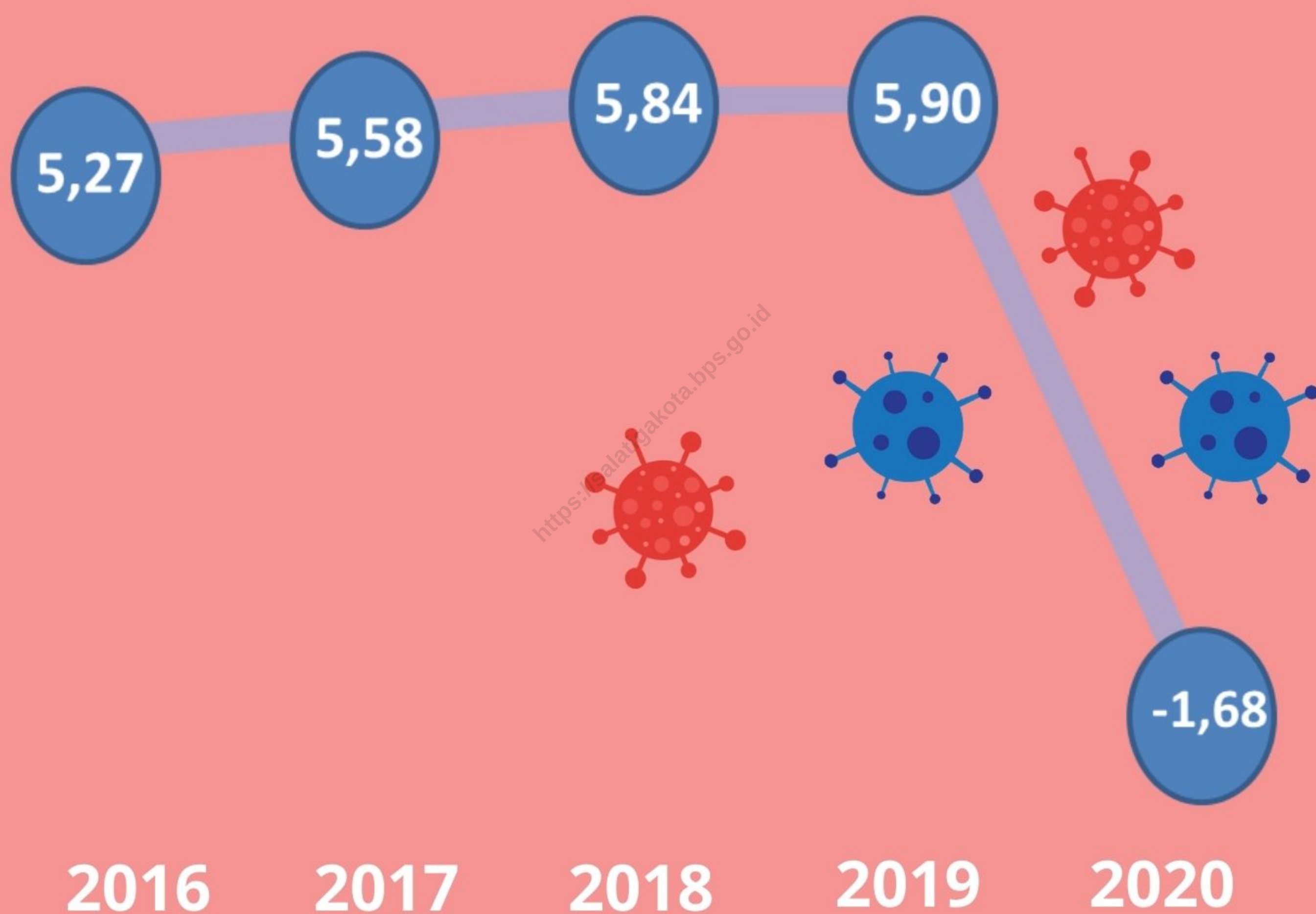
- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

PERTUMBUHAN PDRB PENGELUARAN

KOTA SALATIGA

TAHUN 2020 (PERSEN)



<https://salatigakota.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SALATIGA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2016 - 2020

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SALATIGA MENURUT PENGELUARAN

Perekonomian Kota Salatiga periode 2016 sampai dengan 2019 memiliki pertumbuhan yang cukup stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) baik di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun secara Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sejak tahun 2016 selalu diatas 5 persen. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga terkontraksi dengan pertumbuhan sebesar -1,68 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara berturut-turut yaitu 5,27 persen, 5,58 persen, 5,84 persen dan 5,90 persen. Pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*) diikuti oleh pertumbuhan pada komponen pengeluaran (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.

**Tabel 1. PDRBAdh Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 812,68	7 365,52	7 933,00	8 554,92	8 539,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99,37	109,91	121,17	137,40	136,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 046,15	1 113,30	1 179,63	1 258,40	1 251,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 980,01	5 469,65	6 194,59	6 770,53	6 284,92
5. Perubahan Inventori	59,55	86,91	121,34	103,50	124,34
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2 463,19)	(2 762,94)	(3 210,56)	(3 514,48)	(3 066,87)
PDRB PENGELUARAN	10 534,59	11 382,35	12 339,18	13 310,27	13 269,94

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kota Salatiga adh Berlaku selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 terjadi penurunan nilai, hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRBAdh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 281,53	5 536,01	5 817,58	6 109,79	6 040,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	68,19	73,32	79,03	87,64	85,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	699,58	714,81	744,94	788,79	776,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 655,43	3 927,43	4 241,06	4 458,90	4 150,35
5. Perubahan Inventori	59,32	62,96	64,76	64,88	121,58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1 595,81)	(1 690,30)	(1 819,51)	(1 843,99)	(1 671,46)
PDRB PENGELUARAN	8 168,24	8 624,24	9 127,86	9 666,00	9 503,16

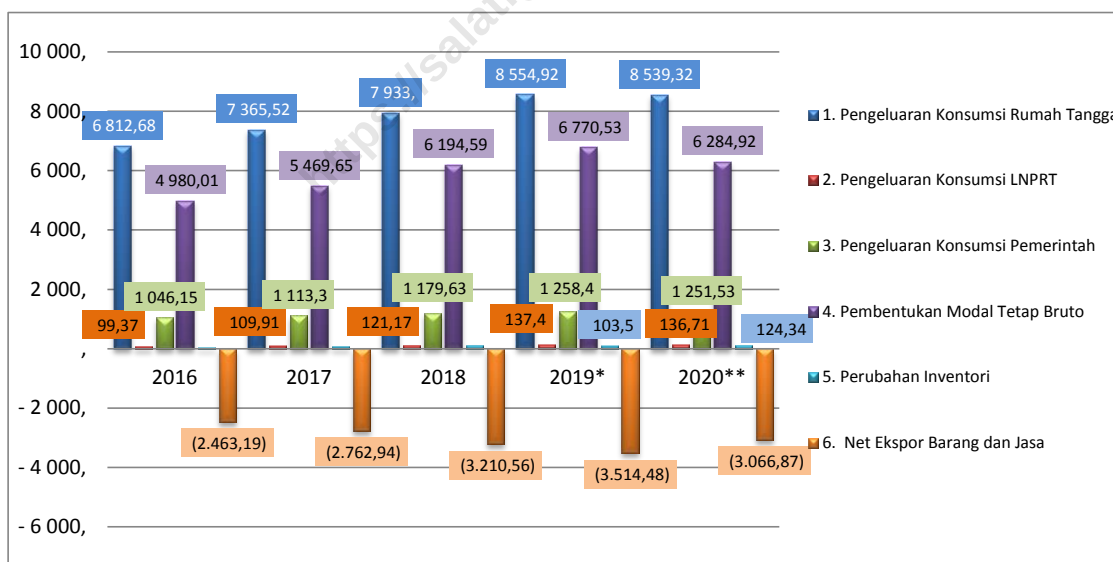
* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai dengan adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat

memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016–2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Salatiga berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran akhir dengan nilai 9.503,16 milyar rupiah.

Dari grafik berikut, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.

**Grafik 1. PDRB Adh Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020
(milyar rupiah)**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP),

pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Perubahan inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku Kota Salatiga
menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019**	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,67	64,71	64,29	64,27	64,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,94	0,97	0,98	1,03	1,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,93	9,78	9,56	9,45	9,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,27	48,05	50,20	50,87	47,36
5. Perubahan Inventori	0,57	0,76	0,98	0,78	0,94
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(23,38)	(24,27)	(26,02)	(26,40)	(23,11)
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2016 – 2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (sekitar 65%). Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki peranan sebesar 64,67 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 64,71, dan mengalami penurunan selama dua tahun (64,29% pada tahun 2018 dan 64,27% pada tahun 2019). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan peningkatan persentase pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain dan memiliki persentase sebesar 64,35 persen.

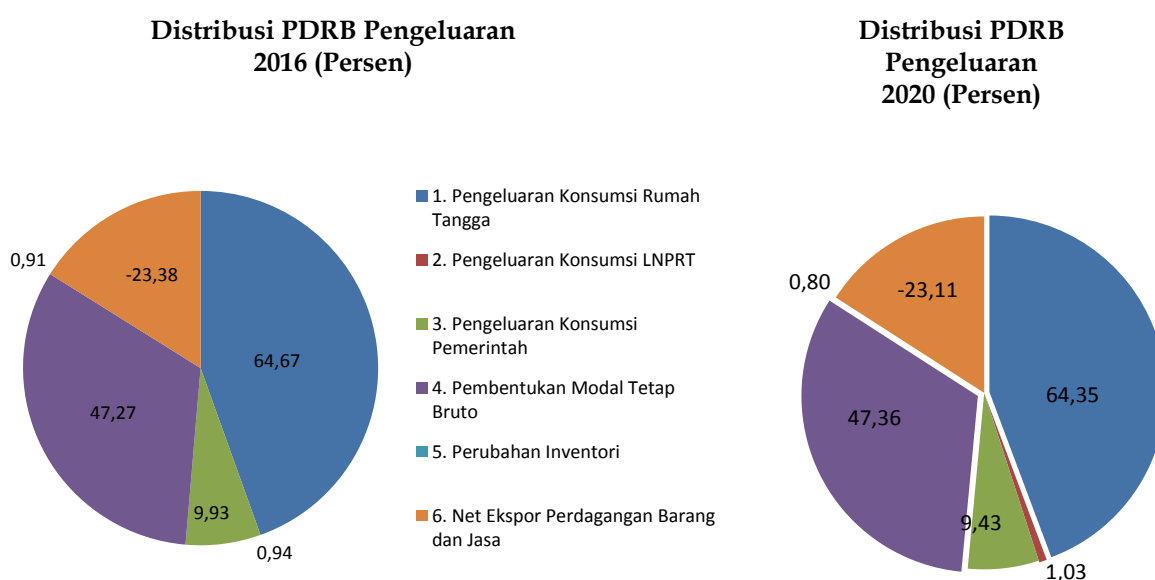
Peranan terbesar berikutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto. Indikator percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang juga dapat terlihat dari peningkatan peranan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pada tahun 2016 PMTB Kota Salatiga memiliki peranan terhadap PDRB sebesar 47,27 persen dan terus mengalami peningkatan peranan pada tiga tahun terakhir yaitu menjadi 48,05 persen tahun 2017, 50,20 persen tahun 2018, 50,87 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun menjadi 47,36 persen terimbas dari pandemi Covid-19. PMTB pada sisi pengeluaran berkorelasi positif dengan sisi lapangan usaha pada kategori

konstruksi (PMTB bangunan) dan kategori Industri Pengolahan (PMTB non-Bangunan). Kategori Konstruksi tahun 2020 memiliki pertumbuhan -3,85 persen sehingga mempengaruhi persentase komponen PMTB.

Komponen Pengeluaran Pemerintah memberikan peranan terbesar berikutnya dengan nilai peranan pada tahun 2016 sebesar 9,93 persen. Peranan ini terus mengalami penurunan pada tahun tahun berikutnya. Tahun 2020 peranan Komponen Pengeluaran Pemerintah menjadi 9,43 persen. Penurunan peranan pemerintah ini menunjukkan peran komponen rumah tangga dan swasta dalam perekonomian semakin meningkat. Kemudahan kebijakan, regulasi dan perijinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta mengakibatkan banyaknya investor swasta berinvestasi di Kota Salatiga sehingga peranan rumah tangga dan swasta lebih tinggi dibanding peranan pemerintah dalam struktur ekonomi.

Komponen terakhir yang memberikan peranan terkecil yaitu komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Tahun 2016 komponen ini hanya memberikan peranan sebesar 0,94 persen, kemudian mengalami peningkatan peranan pada tiga tahun terakhir. Peranan komponen ini terus mengalami pertumbuhan menjadi 1,03 persen pada tahun 2020.

**Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2016 dan Tahun 2020**



Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan PDRB adh Konstan sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan harga antar tahun yang dibandingkan. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dari tahun 2016-2019 selalu diatas 5,00 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,27 persen (2016); 5,58 persen (2017); 5,84 persen (2018) dan 5,90 persen (2019). Tahun 2020 Kota Salatiga memiliki pertumbuhan negatif dengan nilai -1,68 persen.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	4,82	5,09	5,02	(1,14)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,52	7,54	7,79	10,89	(1,99)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,29	2,18	4,21	5,89	(1,54)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,67	7,44	7,99	5,14	(6,92)
5. Perubahan Inventori	78,64	6,14	2,85	0,19	87,40
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2,60)	(5,92)	(7,64)	(1,35)	9,36
PDRB PENGELUARAN	5,27	5,58	5,84	5,90	(1,68)

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, laju pertumbuhan indeks implisit¹ PDRB adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar wilayah Kota Salatiga).

¹ Indeks perkembangan harga

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016–2020 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,81	3,14	2,49	2,68	0,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	3,17	2,85	2,28	2,26	1,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	4,15	1,67	0,75	1,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,33	2,23	4,88	3,96	(0,27)
5. Perubahan Inventori	(62,19)	37,50	35,74	(14,86)	(35,90)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,45)	5,90	7,95	8,01	(3,73)
PDRB PENGELUARAN	3,01	2,33	2,43	1,86	1,41

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran baik untuk wilayah Salatiga, Provinsi Jawa Tengah maupun secara Nasional. Data pada Tabel 6 menunjukkan struktur perekonomian Kota Salatiga sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2016 – 2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan *trend* menurun secara perlahan. Peranan pada tahun 2016 sebesar 64,67 persen, tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan peranan menjadi 64,71 persen namun kembali menurun pada dua tahun terakhir yaitu 64,29 persen pada tahun 2018 dan 64,25 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 proporsi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali meningkat menjadi 64,35 persen. Dampak

Covid-19 walaupun menurunkan daya beli masyarakat, namun masih memiliki ketahanan dibandingkan komponen-komponen yang lain.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 36,54 juta rupiah selama setahun, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2019 rata-rata konsumsi per kapita Kota Salatiga sebesar 44,08 juta rupiah. Tahun 2020 rata-rata konsumsi perkapita Kota Salatiga mengalami penurunan dan memiliki nilai 43,44 juta rupiah pertahun.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	6 812,68	7 365,52	7 933,00	8 554,92	8 539,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5 281,53	5 536,01	5 817,58	6 109,79	6 040,15
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	64,67	64,71	64,29	64,27	64,35
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	133 104,44	142 172,21	151 228,71	161 212,75	159 113,73
b. ADHK 2010	103 189,23	106 858,33	110 901,91	115 135,60	112 546,50
Rata-rata konsumsi per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	36 544,82	38 985,83	41 410,26	44 078,42	43 435,19
b. ADHK 2010	28 331,37	29 302,22	30 367,76	31 480,11	30 723,17
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total konsumsi RT	4,38	4,82	5,09	5,02	(1,14)
b. Per-RT	3,04	3,56	3,78	3,82	(2,25)
c. Perkapita	2,92	3,43	3,64	3,66	(2,40)
Jumlah RT (unit)	51 183	51 807	52 457	53 066	53 668
Jumlah penduduk (org)	186 420	188 928	191 571	194 084	196 599

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Secara total, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga adh Konstan pada tahun 2016 sebesar 4,38 persen. Tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 masih terus mengalami pertumbuhan di kisaran empat sampai lima persen. Pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020, mengakibatkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan daya beli oleh masyarakat menyebabkan penurunan nilai yang tinggi pada tahun 2020. Faktor penambahan jumlah penduduk yang menjadi dasar pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih lebih rendah dibandingkan penurunan daya beli masyarakat.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita Kota Salatiga tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan konsumsi per kapita pada masing-masing tahun mencapai 2,92 persen (2016); 3,43 persen (2017); 3,64 persen (2018) dan 3,66 persen (2019). Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,40 persen.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPR

Peranan konsumsi akhir LNPR dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu di kisaran 1 (satu) persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPR adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 7 memperlihatkan pertumbuhan konsumsi LNPR kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 lebih cepat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,52 persen setelah mengalami kontraksi di tahun sebelumnya serta adanya persiapan pemilihan walikota pada bulan Februari 2017. Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,54 persen. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen, dan tahun 2019 penggunaan konsumsi LNPR kembali meningkat cukup tinggi sebesar 10,89 persen imbas dari Pemilu Legislatif dan Presiden pada April 2019. Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,99 persen. Konsumsi LNPR lebih rendah

dari tahun sebelumnya salah satunya adalah menurunnya konsumsi di lembaga keagamaan akibat dampak pandemi Covid-19. Pembatasan berkumpulnya masyarakat yang berdampak pada berkurangnya kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu penyebab konsumsi lembaga non profit berkurang.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	99,37	109,91	121,16	137,40	136,71
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	68,18	73,32	79,03	87,64	85,89
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,94	0,97	0,98	1,03	1,03
Pertumbuhan (% ADHK)	5,52	7,54	7,79	10,89	(1,99)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah, konsumsi akhir rumah tangga dan konsumsi LNPRT merupakan keseluruhan dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010.

Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1 (satu) triliun rupiah, kemudian meningkat hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 1,26 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1 046,15	1 113,30	1 179,63	1 258,40	1 251,53
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	699,58	714,81	744,94	788,79	776,65
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	9,93	9,78	9,56	9,45	9,43
Konsumsi Pemerintah Perkapita					
a. ADHB (<i>Ribu Rp</i>)	5 611,80	5 892,73	6 157,69	6 483,79	6 365,91
b. ADHK 2010 (<i>Ribu Rp</i>)	3 752,73	3 783,51	3 888,58	4 064,16	3 950,43
Pertumbuhan¹⁾					
a.Total konsumsi pemerintah	0,29	2,18	4,21	5,89	(1,54)
b. Konsumsi perkapita	1,34	0,82	2,78	4,52	(2,80)
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	186 420	188 928	191 571	194 084	196 599

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB pada periode 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan “trend” yang menurun. Pada tahun 2016 memiliki peranan sebesar 9,93 persen, dan terus mengalami penurunan. Peranan komponen ini sampai dengan tahun 2020 menjadi 9,43 persen terhadap total PDRB. Penurunan peranan ini tentunya digantikan oleh komponen lain yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan komponen pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2019, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata

konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2020 pengeluaran ini menerima dampak dari pandemi Covid-19 sehingga nilai *adh berlaku* maupun *adh konstan* (2010) mengalami penurunan. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per kapita *adh Berlaku* sebesar 5,61 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 6,48 juta rupiah pada tahun 2019. Tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita *adh Berlaku* lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 6,37 juta rupiah.

Konsumsi akhir pemerintah secara “*riil*” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per kapita antara tahun 2016-2019. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan konsumsi pemerintah tercepat terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,89 persen dan memiliki pertumbuhan negatif pada tahun 2020 dampak dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar -1,54 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*kapital*)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), komponen PMTB juga senantiasa mengalami pertumbuhan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami perkembangan yang menggembirakan, sedangkan tahun 2020 seperti halnya komponen yang lain terimbas dari

²Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

pandemi Covid-19 sehingga memiliki pertumbuhan negatif yang cukup dalam. Pertumbuhan komponen PMTB setiap tahunnya adalah 5,67 persen (2016); 7,44 persen (2017); 7,99 persen (2018) dan 5,14 persen (2019); dan -6,92 persen (2020).

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4 980,01	5 469,65	6 194,59	6 770,53	6 284,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 655,43	3 927,43	4 241,06	4 458,90	4 150,35
Proporsi terhadap PDRB ¹⁾ (%)	47,27	48,05	50,20	50,87	47,36
Pertumbuhan ²⁾ (%)	5,67	7,44	7,99	5,14	(6,92)

¹⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

²⁾Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

F. STRUKTUR PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2016 – 2020**

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	59,55	86,91	121,34	103,5	124,34
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	59,32	62,96	64,76	64,88	121,58
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,57	0,76	0,98	0,78	0,94

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis pertumbuhannya, maka untuk perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi.

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB tahun 2016 (0,57%); 2017 (0,76%); 2018 (0,98%); 2019 (0,78%) dan tahun 2020 memiliki proporsi sebesar 0,94 persen.

G. STRUKTUR NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net ekspor barang dan jasa antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Konsep antar daerah disini adalah antara kabupaten/kota yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Dalam penghitungannya masih dibantu dengan metode *cross-hauling*.

Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar

kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang, yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah hasilnya juga dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian juga sebaliknya.

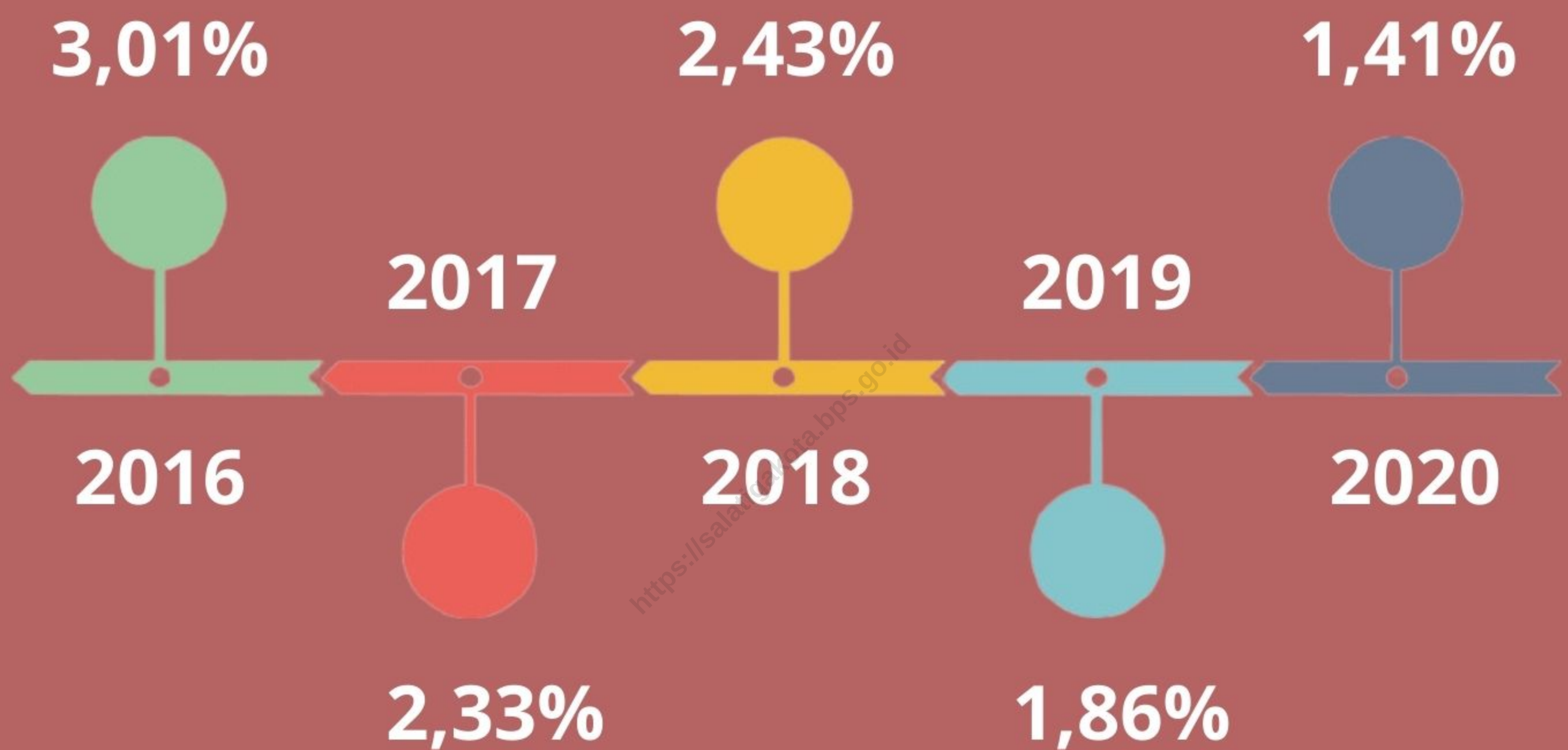
**Tabel 11. Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	(2 486,59)	(2 463,19)	(2 762,93)	(3 210,56)	(3 512,22)
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	(1 555,40)	(1 595,81)	(1 690,30)	(1 819,51)	(1 845,41)
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	(23,38)	(24,27)	(26,02)	(26,40)	(23,11)

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Kontribusi net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2016-2020 selalu bernilai negatif, baik adh berlaku maupun adh konstan. Hal ini menunjukkan nilai impor antar daerah lebih besar nilainya daripada nilai ekspor, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah Kota Salatiga dengan kabupaten/kota lain selalu mengalami *defisit* seperti terlihat pada tabel 11. Peningkatan pemenuhan barang dan jasa dari produksi wilayah Kota Salatiga serta peningkatan ekspor produk barang dan jasa akan memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga dan dapat mengurangi nilai defisit dari net ekspor barang dan jasa.

PERTUMBUHAN IMPLISIT PDRB PENGELUARAN KOTA SALATIGA TAHUN 2020



BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KOTA SALATIGA
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2016 - 2020

<https://salatigakota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB PER KAPITA

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakatnya karena mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat digunakan untuk indikator perkembangan kemakmuran suatu daerah walaupun dengan asumsi semua masyarakat memiliki andil yang sama dalam pembentukan PDRB tersebut bukan hanya masyarakat tertentu saja (menghilangkan pengaruh tingkat pengeluaran rumah tangga yang tinggi, menengah ataupun rendah).

**Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10 534,59	11 382,35	12 339,18	13 310,27	13 269,94
- ADHK 2010	8 168,24	8 624,24	9 127,86	9 666,00	9 503,16
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	56 509,99	60 247,02	64 410,48	68 579,94	67 497,49
- ADHK 2010	43 816,34	45 648,29	47 647,39	49 803,20	48 337,80
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3,80	4,18	4,38	4,52	(2,94)
Jumlah penduduk (orang)	186 420	188 928	191 571	194 084	196 599
Pertumbuhan	1,42	1,35	1,40	1,31	1,30

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan terjadi pertumbuhan negatif dengan nilai -2,94 persen seperti terlihat pada tabel 12 di atas. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Salatiga rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada di bawah pertumbuhan penduduk.

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	6 812,68	7 365,52	7 933,00	8 554,92	8 539,32
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	4 980,01	5 469,65	6 194,59	6 770,53	6 284,92
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,37	1,35	1,28	1,26	1,36

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 1,32 kali. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 1,32 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Kurun waktu tahun 2016-2019 rasio ini terus mengalami penurunan sehingga menunjukkan prospek yang baik terhadap perekonomian.

Penurunan tersebut menggambarkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar pada lima tahun terakhir dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tahun 2020 rasio ini kembali meningkat, hal ini menunjukkan pandemi Covid-19 lebih berdampak kepada pengeluaran PMTB dibandingkan dengan Konsumsi Rumah Tangga.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 14. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	6 812,68	7 365,52	7 933,00	8 554,92	8 539,32
b. LNPRT	99,37	109,91	121,17	137,40	136,71
c. Pemerintah	1 046,15	1 113,30	1 179,63	1 258,40	1 251,53
Jumlah	7 958,21	8 588,72	9 233,80	9 950,72	9 927,56
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	10 534,59	11 382,35	12 339,18	13 310,27	13 269,94
Proporsi	75,54	75,46	74,83	74,76	74,81

* Angka Sementara** Angka Sangat Sementara

Sekitar 75 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Salatiga digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Tahun 2016 sampai dengan 2020 proporsinya berfluktuatif. Tahun 2016 memiliki proporsi 75,54 persen dan tahun 2020 memiliki proporsi 74,81 persen.

D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi *surplus*, dan sebaliknya yang terjadi adalah *defisit*. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2016-2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Salatiga dengan luar negeri dan antar kabupaten/kota/provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Salatiga selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “hutang luar wilayah”.

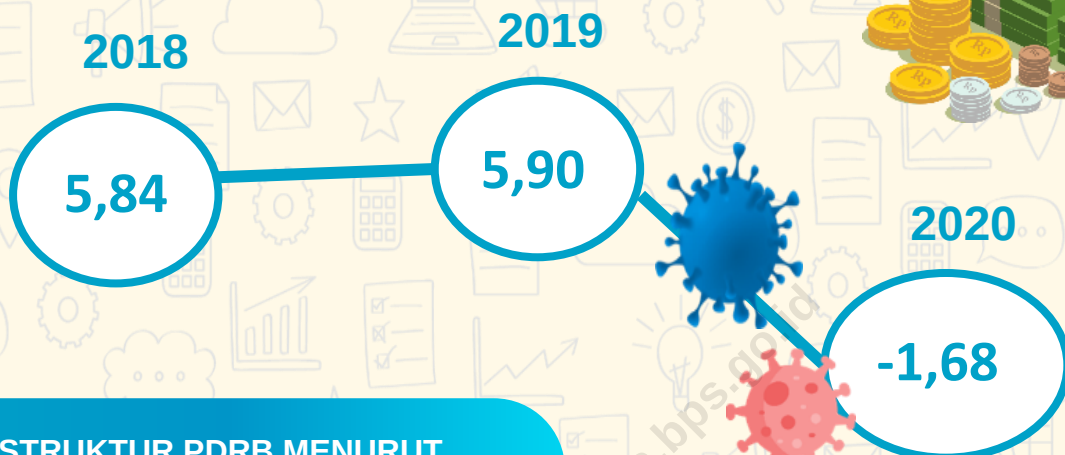
**Tabel 15. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	10 534,59	11 382,35	12 339,18	13 310,27	13 269,94
Net ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rp)	(2 463,19)	(2 762,94)	(3 210,56)	(3 514,48)	(3 066,87)
Proporsi Net Ekspor (Miliar Rp)	(23,38)	(24,27)	(26,02)	(26,40)	(23,11)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA SALATIGA 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI 2018-2020 (%)



STRUKTUR PDRB MENURUT PENGELUARAN Tahun 2020 (persen)

KONSUMSI RUMAH
TANGGA 64,35

KONSUMSI
LNPR 1,03

KONSUMSI PEMERINTAH 9,43

PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO 47,36

PERUBAHAN
INVENTORI 0,94

NET EKSPOR -23,11

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2020 (MILYAR RUPIAH)

Rp. 13.269,94

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2020 (2010=100) (MILYAR RUPIAH)

Rp. 9.503,16

BAB V

PENUTUP

<https://salatigakota.bps.go.id>

1. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kota Salatiga tahun 2020 adh Berlaku mencapai 13,27 triliun rupiah. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian di seluruh wilayah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 74,81 persen dimana 64,35 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga. Tahun 2020 memiliki pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -1,68 persen, demikian juga konsumsi rumah tangga memiliki pertumbuhan negatif sebesar -1,14 persen.
3. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kota Salatiga dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini pada tahun 2020 sebesar 47,36 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kota Salatiga 47,36 persen. Dampak Covid-19 mempengaruhi investasi yang ada sehingga tahun 2020 memiliki pertumbuhan negatif sebesar -6,92 persen. Penurunan investasi ini menjadi gambaran umum secara nasional bukan hanya terjadi di Kota Salatiga.
4. Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Salatiga memiliki nilai negatif sehingga setiap tahun terjadi defisit neraca perdagangan. Tahun 2020 nilai Net Ekspor terjadi peningkatan dikarenakan nilai impor barang dan jasa yang turun lebih besar dibandingkan penurunan nilai eksponya.

<https://salatigakota.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020
(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 812 684,69	7 365 515,59	7 933 004,34	8 554 915,93	8 539 315,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99 372,86	109 907,83	121 165,05	137 398,92	136 711,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 046 152,40	1 113 301,03	1 179 634,34	1 258 400,21	1 251 531,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 980 014,25	5 469 647,23	6 194 593,33	6 770 532,33	6 284 915,05
5. Perubahan Inventori	59 554,88	86 912,92	121 343,28	103 503,65	124 337,21
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2 463 187,51)	(2 762 935,88)	(3 210 560,36)	(3 514 482,41)	(3 066 872,07)
PDRB PENGELUARAN	10 534 591,57	11 382 348,72	12 339 179,98	13 310 268,63	13 269 938,91

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020**
(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 281 534,22	5 536 009,52	5 817 581,66	6 109 786,00	6 040 145,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	68 185,27	73 324,59	79 033,18	87 637,68	85 891,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	699 583,23	714 811,06	744 939,28	788 787,71	776 649,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 655 426,06	3 927 434,39	4 241 057,7	4 458 900,45	4 150 351,37
5. Perubahan Inventori	59 318,40	62 960,17	64 755,54	64 879,48	121 582,57
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1 595 805,28)	(1 690 298,75)	(1 819 509,59)	(1 843 986,66)	(1 671 458,32)
PDRB PENGELUARAN	8 168 241,90	8 624 240,98	9 127 857,77	9 666 004,65	9 503 162,71

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,67	64,71	64,29	64,27	64,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,94	0,97	0,98	1,03	1,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,93	9,78	9,56	9,45	9,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	47,27	48,05	50,20	50,87	47,36
5. Perubahan Inventori	0,57	0,76	0,98	0,78	0,94
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(23,38)	(24,27)	(26,02)	(26,40)	(23,11)
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	4,82	5,09	5,02	(1,14)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,52	7,54	7,79	10,89	(1,99)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,29	2,18	4,21	5,89	(1,54)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,67	7,44	7,99	5,14	(6,92)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	5,27	5,58	5,84	5,9	(1,68)

* angka sementara

** angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Salatiga 2016-2020
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,81	3,14	2,49	2,68	0,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,17	2,85	2,28	2,26	1,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	4,15	1,67	0,75	1,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,33	2,23	4,88	3,96	(0,27)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	3,01	2,33	2,43	1,86	1,41

* angka sementara

** angka sangat sementara

Daftar Pustaka

1. BPS Kota Salatiga. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Salatiga : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
2. BPS Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
3. <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html> diakses tanggal 8 April 2021.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA***

Jl. Hasanudin Km 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga
Website: salatigakota.bps.go.id, **Email:** bps3373@bps.go.id

